



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: Reses Masa Sidang III
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 Mei 2020.
Pukul	: 15.00 – 16.55 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (virtual menggunakan zoom)
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan Pemotongan dan Realokasi/ Refocussing Anggaran Pada APBN TA 2020 berdasarkan Perpres No.54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan Surat Menkeu No.S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.
Hadir Komisi X DPR RI	: 31 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.05 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS/Wakil Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menyepakati perubahan pagu anggaran Kemendikbud RI pada APBN TA 2020 pasca terbitnya Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dari sebesar **Rp75.702.668.696.000,-** (*tujuh puluh lima triliun tujuh ratus dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp.70.718.123.434.000,-** (*Tujuh puluh triliun tujuh ratus delapan belas miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dengan pergeseran dan rincian alokasi masing-masing unit utama sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

NO	UNIT UTAMA	PENYESUAIAN SOTK	PENYESUAIAN	PAGU REVISI/AKHIR
1	Setjen	22.788.642.525	707.015.380	22.081.627.145
2	Itjen	221.823.925	36.420.970	185.402.955
3	Ditjen PAUD & Dikdasmen	6.050.595.223	980.957.818	5.069.637.405
4	Balitbang dan Perbukuan	934.997.028	251.204.469	683.792.559
5	Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa	516.162.160	100.000.000	416.162.160
6	Ditjen Kebudayaan	1.804.611.162	410.180.010	1.394.431.152
7	Ditjen GTK	3.593.394.435	1.075.000.000	2.518.394.435
8	Ditjen Dikti	32.002.158.059	385.000.000	31.617.158.059
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	7.790.284.179	1.172.731.069	6.617.553.110
10	Ditjen PAUD Dikmas*	-	-	133.964.454
	TOTAL	75.702.668.696	4.984.545.262	70.718.123.434

*Timbulnya pagu anggaran pada Ditjen Dikdasmen sebesar Rp139.808.813.000,- dan Ditjen PAUD Dikmas sebesar Rp133.964.454.000,- merupakan akibat adanya realisasi DIPA lama sebelum terjadi likuidasi atau penggabungan program.

2. Terhadap pagu anggaran Kemendikbud RI sebagaimana angkat 1 di atas, Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan:

- a. Kemendikbud RI agar menyiapkan skema antisipasi terhadap seluruh program dan kegiatan sebagai konsekuensi realokasi/*refocussing* dan pemotongan anggaran pada semua Eselon I Kemendikbud RI, baik pada bidang pendidikan maupun kebudayaan.
- b. Mendorong Kemendikbud RI untuk meningkatkan pengawasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program prioritas pada semua Eselon I Kemendikbud terutama di daerah 3T.

- c. Kemendikbud RI agar menyampaikan perkembangan penyusunan revisi UU Sisdiknas, khususnya terkait substansi-substansi yang akan direvisi, sehingga dapat diketahui arah regulasi pendidikan ke depan.
 - d. Menekankan Kemendikbud RI untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan dalam upaya melakukan revitalisasi pendidikan vokasi.
 - e. Mendorong Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dan melakukan langkah-langkah strategis terkait adanya pemotongan anggaran tunjangan guru dalam bentuk transfer daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres 54/2020, agar pemotongan tersebut tidak mengganggu kinerja dan kompetensi guru.
 - f. Meminta Kemendikbud RI untuk memberikan penjelasan tambahan secara tertulis terkait rincian dampak pemotongan dan realokasi/*refocussing* anggaran pada setiap Eselon I Kemendikbud RI terhadap kualitas capaian program dan kegiatan prioritas.
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemendikbud RI pada tanggal 19-20 Mei 2020 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud RI tanggal 20 Mei 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.55 WIB

MENDIKBUD RI,



NADIEM ANWAR MAKARIM

KETUA RAPAT,



AGUSTINA W. PRAMESTUTI, SS,M.M.